

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F.X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Ilmiah Informatika, 61-80.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2016). *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan*.
- Biro Pusat Statistik Indonesia (2016). *Daerah Dalam Angka*.
- Chariri dan Ghozali. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cheng, R. H. (1992). *An Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government Accounting Disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy , 11, 1-42.
- Copley, P. (1991). *The association between municipal disclosure practices and audit quality*. Journal of Accounting and Public Policy , 245-266.
- Ratnasari, A. D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Luas pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Donaldson dan Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 49-64.
- Fadzil, F. H., & Nyoto, H. (2011). *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Business Research , 51-70.
- Freeman, R.E. (1983). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. Blackwell Publishing, 183-201.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan (4 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* , 2, 53-64.
- Hendriyani, Ririn & Afrizal Tahar (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Rovinsi Di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 25-33.
- Hilmi, A. Z. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. *Simposium Nasional Akuntansi XV* , 1-26.
- Ingram, R. W. (1984). *Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices*. *Journal of Accounting Research* , 22 (1), 126-144.
- Ingram, R., & De. Jong, D. (1987). *The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices*. *Journal of Accounting and Public Policy* , 6, 245-269.
- Ivancevich, John M. dan Konopaske, Robert dan Mattesson, Michael T. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: BP UNDIP.
- Khasanah. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Luas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). *Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy* , 24, 101-121.
- Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Luas pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lestiani, A. (2008). *Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia*. *Global Review of Accounting and Finance* , 3, 67-84.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasojo, Eko, Maksum, Irfan, R., & Kurniawan, T. (2006). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Raharjo, Eko (2007). *Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective*. Semarang: Fokus Ekonomi, 37-46.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Robbins, W., & Austin, K. (1986). *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. *Journal of Accounting Research* , 24, 412-421.
- Sinaga, Y.F. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Vol. 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardjanto, D. & Yulianingtyas (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 1-94.
- Susbiyani, A., Subroto, B., Sutrisno, & Purnomosidhi, B. (2014). *The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia*. *Research Journal of Finance and Accounting* , 5 (10), 124-130.
- Syafitri, Febriyani. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Luas pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (Vol. 4). Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

- _____. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- _____. (2006). *Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*
- _____. (2008). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- _____. (2016). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.*
- _____. (2007). *Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.*
- _____. (2006). *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- _____. (2011). *Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*